



---

## Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

---

### INFO PENULIS    INFO ARTIKEL

Joko Tri Brata    ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara    Vol. 2, No. 1, April 2022  
[joko\\_tribrata@yahoo.co.id](mailto:joko_tribrata@yahoo.co.id)    <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>  
+6281245629964

Asri Djauhar  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[asridjauhar@gmail.com](mailto:asridjauhar@gmail.com)

Sufrianto  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[sufriantosaja@gmail.com](mailto:sufriantosaja@gmail.com)

St. Jawiah  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[Sjawiah7@gmail.com](mailto:Sjawiah7@gmail.com)

Ni Komang Esi Yuningsih  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[essi\\_saja@yahoo.com](mailto:essi_saja@yahoo.com)

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, S., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 37-46.

---

### Abstrak

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan Khusus penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi masyarakat dari aspek ; (1) masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaan dan (4) Legalitas perencanaan. Metode Penelitian adalah dengan desain penelitian kualitatif menggunakan partisipan secara acak kepada mereka yang memenuhi kriteria sudah bermukim diatas 40 tahun, menggunakan metode observasi dan wawancara, sementara itu teknik analisa data dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah dan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang dimasyarakat. Berkaitan masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, dibutuhkan kerja keras Kepala Desa Alebo agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Berkaitan dengan Sinergitas perencanaan, belum dilakukan optimal, karena keterlibatan masyarakat belum terwakili. Berkaitan dengan indikator keempat yakni Legalitas perencanaan, sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah mengacu pada semua peraturan yang berlaku. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, maka untuk menyempurnakan perencanaan partisipatif, maka faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya ; (1) Pendidikan melalui pelatihan, (2) meningkatkan Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan (3) meningkatkan Partisipasi aktif dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat ; perencanaan ; desa.

### Abstract

Participation is taking part in an activity. Apart from being a key word in development, participation is also one of the characteristics of good governance. The general objective of the research is to describe the form of community participation in the planning and management process of development. The specific purpose of the research is to describe community participation from the aspects; (1) problems and needs (2) equal opportunities in planning; (3) planning synergy and (4) planning legality. Research method is a qualitative research design using random participants to those who meet the criteria for having lived above 40 years, using observation and interview methods, meanwhile the data analysis technique is triangulation. Results of the study show that problems and needs are carried out through investigation activities, exploring and collecting local problems and needs that develop in the community. With regard to the community having equal opportunities in planning, the Alebo Village Head's hard work is needed in order to foster public trust and increase community participation in the development planning process. With regard to planning synergies, it has not been carried out optimally, because community involvement has not been represented. Regarding the fourth indicator, namely the legality of planning, it is in accordance with existing regulations and can be accounted for, because it refers to all applicable regulations. Seeing the important and positive impact of participatory planning, to improve participatory planning, the community involvement factor can be increased by efforts; (1) Education through training, (2) increasing active participation in gathering information and (3) increasing active participation in providing alternative plans and proposals to the government.

**Key Word:** society participation ; planning; village.

## A. Pendahuluan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi awal yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam kaitan dengan pembangunan, disebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Dalam menelusuri Pendekatan '*community base management*', pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Dalam kaitan dengan pembangunan desa, bentuk partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Dengan gambaran tersebut, telaah dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa perencanaan yang partisipatif dapat meningkatkan minat masyarakat dan akan berdampak pada hasil pembangunan. Hal ini memperjelas bahwa proses yang baik akan metode partisipatif dalam kegiatan pembangunan. Olehnya itu, untuk membuktikan hasil temuan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji dari aspek ; (1) fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaan dan (4) Legalitas perencanaan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan model perencanaan partisipatif dengan locus di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

## B. Metode

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu bentuk penelitian yang menggunakan metode penalaran induktif dan percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).

## 2. Partisipan

Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara sengaja dipilih secara random (acak). Pemilihan partisipan didasari oleh berbagai pertimbangan, yaitu: (1) masyarakat Desa Alebo yang bermukim diatas 30 tahun karena dimanknai sangat faham akan kondisi lokasi penelitian; (2) aparat desa yang menjadi informan tambahan dalam penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti keaktifan masyarakat dalam melakukan dan aktif dalam mengikuti proses perencanaan di desanya. Adapun teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana keinginan yang baik dari masyarakat akan pentingnya proses perencanaan.

## 4. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah lembar pengamatan selama proses penelitian dan pedoman wawancara untuk menggali secara langsung informasi berkaitan dengan topik penelitian, khususnya pemahaman akan pentingnya perencanaan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons masyarakat dalam kegiatan perencanaan Selanjutnya menyajikan data dari hasil pengelompokan sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi setelah data disajikan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

Desa Alebo terletak kurang lebih 90 KM dari Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan atau kurang lebih 3 KM dari Ibu Kota Kecamatan Konda, Desa Alebo sebagian besar dihuni suku Jawa dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap.

Desa Alebo adalah desa ex transmigrasi tahun 1973, yang di pimpin oleh bapak Sutrisno Sebagai kepala Unit transmigrasi Dinas sosial dari Tahun 1975. Dari tahun 1975 – 1977 di jabat oleh Edi karabut sebagai kepala desa terpilih, Dari tahun 1977 s/d 1985 di jabat oleh Mulyo. Pada tahun 1985 s/d 1986 dijabat oleh Ibrahim Tawakal sebagai Pj kepala desa. tahun 1986 s/d 1992 kepala desa dijabat oleh Sanadi. Tahun 1992 s/d 1993 di jabat oleh Pj kepala desa yaitu Rustam tamburaka. Tahun 1993 s/d 2001 kepala desa di jabat oleh chasan rodhi. Tahun 2002 s/d 2003 dijabat oleh Ishaq sebagai pelaksana [Pj]. Tahun 2003 s/d 2007 kepala desa dijabat oleh Ginten. Tahun 2007 s/d 2022 dijabat oleh Pj kepala desa Ishaq. Tahun 2022 s/d 2014 kepala desa oleh Abdul Manaf Zani. Tahun 2014 Sampai 2016 Kepala Desa dijabat oleh Pelaksana Kepala Desa Ishaq. Tahun 2016 sampai sekarang kepala Desa dijabat oleh Kepala Desa Terpilih Abd. Manaf zani. Pada saat ini Desa Alebo terus memacu dalam mengejar ketertinggalannya dengan harapan dapat setara dengan desa lain yang terlebih dahulu ada di Kecamatan Konda.

Temuan penelitian berkaitan dengan (1) Fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan, dimana salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat local yang berkembang dimasyarakat.

Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap saat dan paling kurang satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam Desa Alebo, dimana dapat dicontohkan bahwa melalui mekanisme Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan,

ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas dalam berbagai tingkatan tentunya dengan skala prioritas yang sesuai tingkatannya.

Dalam mendeskripsikan masalah kedua yaitu masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, maka dibutuhkan kerja keras Kepala Desa dalam mengupayakan kerja sama serta memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang tentunya akan berbuah dukungan dari warga. Masyarakat dipersepsikan turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hubungan yang baik antara Kepala desa dan masyarakatnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disimpulkan bahwa untuk beberapa tema atau rencana pembangunan, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti dalam beberapa kesempatan, masyarakat belum merasakan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil aparat desa yang ada di Desa Alebo yang memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Dalam kaitan dengan indikator ketiga yang berkaitan dengan Sinergitas perencanaan, yang berarti bahwa ada model partisipatoris dalam perencanaan pembangunan di Desa Alebo, temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

Untuk Desa Alebo, musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Walaupun sudah rutin dilakukan, namun dalam kenyataannya musrenbang Desa Alebo, belum dilakukan optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan Desa Alebo. Walaupun pandangan dari aparat desa Alebo menyatakan bahwa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat, yang dari setiap perwakilan desa itu ada 4 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, Tokoh masyarakat, dan PKK, dan nara sumber dari Kantor Kecamatan. (Wawancara tanggal 9 Maret 2022), tetapi berbanding terbalik dengan komentar dari masyarakat yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, dikatakan bahwa mereka mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan. Forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musyawarah desa, perwakilan masyarakat dalam forum-forum sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. (Wawancara tanggal 12 Maret 2022)

Dalam kaitan ini juga ditemukan jawaban bahwa Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata sangat ditekankan.

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari APBN. Seperti program Alokasi Dana Desa yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Dana Desa yaitu program pembangunan yang sumber dananya dari pusat.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Februari-Maret yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil

memaduserasikan antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan desa. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan yang ada di Desa.

Berkaitan dengan indikator keempat yakni Legalitas perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Alebo sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan terkait yang ada dibawahnya.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

## 2. Pembahasan

Hasil penelitian sudah dideskripsikan mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan hasil perencanaan sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendapat Wijaya (2001:16) sebagai acuan analisis yang mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

**Pertama**, Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Alebo dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi. Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah: (1) Menentukan arah dan tujuan kegiatan perencanaan pembangunan oleh masyarakat, (2) Teridentifikasinya jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat dan (3) Teridentifikasinya rencana program masyarakat dalam pembangunan.

Hasil simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo.

Pada fase Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan bahwa kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga diperoleh pokok masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian bentuk perencanaan lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musbang dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat pada beberapa perencanaan hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam beberapa perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.

**Kedua,** Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegiatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan ditemukan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor: (1) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, (2) Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan –usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi., (3) Terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang bertugas mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat dan (4). Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan. Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif.

**Ketiga,** sinergitas perencanaan dalam konteks menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat di Desa Alebo, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah, tetapi dari unsur keterwakilan wilayah ditemukan sudah baik, karena semua desa mempunyai wakil dalam musrenbang dan semua dusun terwakili dalam musyawarah desa.

Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa, dan daftar prioritas masalah di bawah desa. Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya, dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

**Keempat,** legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab Camat Konda, sementara itu tanggung jawab perencanaan di Desa Alebo merupakan tanggung jawab Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa Alebo. Dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa perencanaan partisipatif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan keluaran. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan; (2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Alebo Kecamatan Konda masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah

satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

Geddesian (dalam Soemarmo, 2005: 26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Alebo, ada beberapa faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya :

1. Pendidikan melalui pelatihan

Pendidikan melalui pelatihan untuk masyarakat Desa Alebo belum dilakukan secara menyeluruh, pendidikan mengenai perencanaan pembangunan hanya diberikan kepada kader yaitu sejumlah orang sebagai wakil dari setiap desa. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas.

2. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kecamatan Desa Alebo, hanya sebagian kecil desa yang melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan pengumpulan informasi secara kontinyu (terus menerus) baik itu informasi formal maupun informasi pelengkap yang akan dipakai pada saat dilakukan perencanaan.

3. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah, meskipun alternative rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Menurut Alexander Abe (2002: 91-92) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu; **Pertama**, perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat, perencanaan ini bisa merupakan: (a) perencanaan lokasi-setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada; (b) perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan. **Kedua**, perencanaan disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk yang kedua ini, masyarakat sebaiknya masih tetap terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan partisipatif dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo, maka yang dilaksanakan merupakan bentuk pertama, dimana perencanaan disusun langsung oleh bersama masyarakat, walaupun untuk sebagian kasus ada beberapa perencanaan desa masih belum melibatkan masyarakat semua lapisan dalam proses perencanaan pembangunan terlebih dalam proses identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang disusun bersama masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Menurut Alexander Abe (2002), untuk mengorganisasi perencanaan model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni: (a) Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama, (b) Prinsip ini secara keseluruhan belum dilaksanakan di Desa Alebo Kecamatan Konda, yaitu pelaksanaan rembug RT, dimana peserta yang hadir adalah orang yang biasa dikenal sehari-hari dalam lingkungan RT. Sehingga perasaan saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama tentunya ada. (c) Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan, kesetaraan menjadi penting. Poin ini sudah dilaksanakan dengan baik di Desa Ale Kecamatan Konda. (d) Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat.

Hal ini belum ditunjukkan dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo Kecamatan Konda, dimana masih ada praktek perang intelektual, sehingga penetapan hasil musrenbang dilakukan secara sepihak oleh kecamatan tanpa melibatkan

peserta, dimana (a) Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta atau kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi ; (b) berproses berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif dan (c) prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo Kecamatan Konda, prinsip dasar di atas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan.

Salah satu yang dapat juga direkomendasikan adalah dengan menggunakan model jaringan yang disebutkan oleh Tri Brata (2019;10) dengan menganalogi keuntungan model jaringan yang menekankan pada spesialisasi, inovasi, kecepatan, fleksibilitas dan jangkauan. Dimana dalam konsep ini menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan haruslah ada kolaborasi disemua unit dan jaringan yang ada. Analogi ini merepleksikan bahwa dalam sebuah perencanaan, dibutuhkan kolaborasi atau bahasa lain kerjasama antar para pihak.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan yang partisipatif selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*"

Perencanaan yang partisipatif adalah perencanaan yang didalamnya memuat (1) Fokus perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, (2) Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, (3) Sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders dan haruslah legal, karena (4) Legalitas perencanaan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada, dimana pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

#### **E. Referensi**

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Bob, S. H. (2009). *Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Brata, J. T., Bariun, L. O., & Djauhar, A. (2019). Poverty Reduction through Slum Program Collaboration in Kendari City. *Iosrjournals*, 24(9): 08-15, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
- CESS. (2003) *Program Antikemiskinan di Indonesia, Pemetaan Informasi dan Kegiatan*. Jakarta: Center for Economics and Social Studies
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Conyers, D., & Hills, P. (1992). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan sons. New york Hasibuan,
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Faturochman, et. al. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Moelyarto. (1995). *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Michael, T. (1977). *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Milles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. Jakarta: UI Percetakan.
- Royat, S. (2008), *Sistem Pengelolaan Informasi*, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jakarta: Mandiri.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2: 312
- Siagian, S. P. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemarmo. (2005). Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), *Tesis: Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sumarto, Sudarno, Usman, S., & Mawardi, S. (1997). *Agriculture's Role in Poverty Reduction: Bringing Farmers to the Policy Fomulation Process. [Peran Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan: Melibatkan Petani ke dalam Proses Perumusan Kebijakan]*. Agriculture Sector Strategy Review. Jakarta: Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: dengan pokok bahasan khusus perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tjokroamidjojo. (1989). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung. Tjokrowinoto, TKPK (2007) *Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Versi Desember 2007. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Undang-undang No. 25. (2004). *tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional*.
- Wijaya, R. (2001). Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (*Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*). *Tesis: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dala Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2). ISSN. 2442-6962.